

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**



**SALINAN**

**TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI A  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 11 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah direncanakan mengalami perkembangan sehingga mengakibatkan terjadinya Perubahan Anggaran Unit Organisasi, maka Pemerintah Kota Bogor telah menyusun Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

- c. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi dari Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.539-Keu/2007 tanggal 2 Nopember 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Kota Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor telah melakukan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk dasar penetapan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383 );

9. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 16 Seri E); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Bogor Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 17 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 6 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ( Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
dan  
WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 611.359.961.629,00		
2. Belanja	Rp. <u>658.754.433.847,40</u>		
	Surplus/(Defisit)		Rp.
(47.394.472.218,40)			
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp. 73.910.688.176,00		
b. Pengeluaran	Rp. <u>26.516.215.957,60</u>		
	Pembiayaan Netto	Rp 47.394.472.218,40	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp		00.00

## **Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 71.687.047.669,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 444.305.127.625,00
  - c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 95.367.786.335,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 35.489.319.500,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 25.919.360.647,00
  - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 4.930.763.522,00
  - b. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 5.347.604.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Dana bagi Hasil sejumlah Rp. 80.709.127.625,00
  - b. Dana Alokasi Umum Rp. 355.776.000.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 7.820.000.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pendapatan:
- a. Hibah sejumlah Rp. 10.000.001.400,00
  - b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,00
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 49.078.900.000,00
  - d. Dana Penyesuaian sejumlah Rp. 9.500.000.000,00
  - e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 26.788.884.935,00

## **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 295.953.349.478,04
  - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 362.801.084.369,36

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
- |                                                                                                               |     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah                                                                                   |     | Rp.               |
| 239.590.515.080,00                                                                                            |     |                   |
| b. Belanja Bunga sejumlah                                                                                     | Rp. |                   |
| c. Belanja Subsidi sejumlah                                                                                   |     | Rp.               |
| 0,00                                                                                                          |     |                   |
| d. Belanja Hibah sejumlah                                                                                     |     | Rp.               |
| 765.000.000,00                                                                                                |     |                   |
| e. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah                                                                            |     | Rp.               |
| 37.464.967.422,40                                                                                             |     |                   |
| f. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/ dan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk Kota Bogor sejumlah | Rp. | 1.020.000.000,00  |
| g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kel.                                                                       | Rp. | 12.510.000.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah                                                                             | Rp. | 4.602.866.975,64  |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
- |                                     |     |                    |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah         | Rp. | 57.964.189.593,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 153.019.559.163,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah           | Rp. | 151.817.335.613,36 |

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp. | 73.910.688.176,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 26.516.215.957,60 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- |                                                                              |     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 73.910.688.176,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah                                          | Rp. | 0,00              |
| c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah                  | Rp. | 0,00              |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah                                       | Rp. | 0,00              |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah                            | Rp. | 0,00              |

f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah                      Rp.  
0,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah      Rp. 14.000.000.000,00
  - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah                                      Rp. 12.516.215.957,60
  - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah                      Rp.                      0,00
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah                      Rp.                      0,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I              Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Lampiran II             Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, SKPD.
3. Lampiran III            Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV            Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V             Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI            Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII           Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII        Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX            Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah;

### **Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 13 Nopember 2007

**WALIKOTA BOGOR,**  
**t.t.d**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 13 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR**  
**t..t.d**  
**DODY ROSADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI A**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
Kepala Bagian hukum,

Ida Priatni